

PERAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN PUBLIK ISLAM

La Ode Muhammad Hasrul Adan

Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Corresponding Author: lomuhasruladan@umbuton.ac.id

Received: 01 Februari 2026. Reviewed: 02 Maret 2026. Accepted: 01 April 2026. Publications: 30 April 2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntansi syariah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik Islam. Akuntansi syariah merupakan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan larangan riba. Dalam konteks keuangan publik Islam, akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola yang menjamin penggunaan dana publik secara tepat sasaran dan sesuai dengan maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal, serta regulasi yang relevan dengan akuntansi syariah dan pengelolaan keuangan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah dapat meningkatkan efisiensi melalui pengendalian anggaran yang sistematis, pencegahan pemborosan, dan optimalisasi penggunaan sumber daya publik. Selain itu, efektivitas keuangan publik meningkat melalui sistem pelaporan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik Islam. Akuntansi syariah memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Efisiensi, Efektivitas, Keuangan Publik Islam, Tata Kelola.

Abstract: This study aims to analyze the role of Islamic accounting in enhancing the efficiency and effectiveness of Islamic public financial management. Islamic accounting is a financial recording and reporting system based on Sharia principles, such as justice ('adl), transparency, accountability (amanah), and the prohibition of riba (interest). In the context of Islamic public finance, Islamic accounting functions not only as an administrative tool but also as a governance instrument that ensures public funds are managed appropriately and in accordance with the objectives of Sharia (maqashid al-shariah). This research employs a qualitative approach using a descriptive-analytical library research method. Data were collected from scholarly literature, academic journals, and relevant regulations concerning Islamic accounting and public financial management. The findings indicate that the implementation of Islamic accounting enhances efficiency through systematic budget control, prevention of wasteful spending, and optimal utilization of public resources. Furthermore, the effectiveness of public finance is strengthened through transparent and accountable financial reporting systems aligned with Sharia principles, thereby increasing public trust in Islamic public institutions. Therefore, Islamic accounting plays a strategic role in establishing professional, transparent, and welfare-oriented public financial governance.

Keywords: Islamic Accounting, Efficiency, Effectiveness Islamic Public Finance Governance.

How to Cite : Rusdin. (2026). Peran Akuntansi Syariah Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Keuangan Publik Islam. LIMITATIONS: Journal of Accounting Research, Volume 1 (1), 9-21. <https://doi.org/XX.XXX XXX/LIMITATIONS.v1i1.19>

INTRODUCTION

Pengelolaan keuangan publik dalam perspektif Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sistem konvensional, karena tidak hanya berorientasi pada efisiensi administratif dan efektivitas anggaran, tetapi juga pada pencapaian nilai-nilai keadilan ('adl), amanah (akuntabilitas), transparansi, dan kemaslahatan umat. Dalam sejarah pemerintahan Islam, pengelolaan keuangan publik telah dikenal melalui institusi Baitul Mal yang berfungsi mengelola sumber-sumber pendapatan negara seperti zakat, kharaj, jizyah, dan wakaf untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat (Chapra, 2000). Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi dalam pengembangan sistem akuntansi syariah modern.

Akuntansi syariah merupakan sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut Muhammad Umer Chapra (2000), tata kelola ekonomi Islam harus dibangun atas dasar moralitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks keuangan publik, akuntansi syariah berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan tujuan syariah (maqashid al-shariah).

Efisiensi dalam keuangan publik mengacu pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output maksimal dengan biaya minimal, sedangkan efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan anggaran (Mardiasmo, 2018). Dalam sistem publik Islam, kedua aspek tersebut harus berjalan beriringan dengan prinsip akuntabilitas vertikal (kepada Allah SWT) dan horizontal (kepada masyarakat). Oleh karena itu, akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan moral dan sosial.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik, penerapan akuntansi syariah menjadi semakin relevan, terutama pada institusi keuangan publik Islam seperti lembaga zakat, wakaf, dan badan pengelola dana sosial keagamaan. Implementasi standar akuntansi syariah yang disusun oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) serta regulasi nasional seperti yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah menunjukkan adanya upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan tata kelola keuangan syariah.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji peran akuntansi syariah dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan transparansi lembaga publik Islam. Penelitian oleh Hasan (2015) menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah pada lembaga zakat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik melalui penyajian laporan keuangan yang lebih transparan. Studi ini menegaskan bahwa standar pelaporan yang sesuai syariah berkontribusi terhadap efektivitas distribusi dana sosial.

Penelitian lain oleh Karim (2001) menekankan bahwa akuntansi dalam perspektif Islam harus mencerminkan nilai moral dan tanggung jawab sosial, sehingga tidak sekadar berorientasi pada laba, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi syariah memiliki peran strategis dalam membangun tata kelola keuangan publik yang berbasis nilai.

Sementara itu, penelitian oleh Farook, Kabir Hassan, dan Lanis (2011) menemukan bahwa tingkat pengungkapan sosial dalam laporan keuangan lembaga keuangan Islam berpengaruh positif terhadap persepsi akuntabilitas dan legitimasi institusi. Temuan ini relevan dengan konteks keuangan publik Islam, di mana transparansi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program anggaran.

Dalam konteks Indonesia, studi oleh Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa reformasi sektor publik membutuhkan sistem akuntansi yang mendukung prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem akuntansi publik dapat memperkuat dimensi etis dalam pengelolaan keuangan negara.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas akuntansi syariah dalam konteks lembaga keuangan dan sektor privat, kajian yang secara khusus menyoroti perannya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas keuangan publik Islam masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih fokus pada aspek kepatuhan syariah dan pelaporan keuangan, sementara analisis mengenai dampaknya terhadap kinerja anggaran publik belum banyak dikaji secara komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana akuntansi syariah dapat berkontribusi secara konkret terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis akuntansi syariah dalam menciptakan sistem keuangan publik yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kemaslahatan umat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur akuntansi syariah sektor publik serta kontribusi praktis bagi pengelola lembaga keuangan publik Islam dalam memperkuat tata kelola yang profesional dan berintegritas.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep, prinsip, dan implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan publik Islam. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang muncul dari permasalahan sosial dan kelembagaan melalui analisis teks dan dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti menelaah berbagai literatur ilmiah, standar akuntansi, serta regulasi yang berkaitan dengan akuntansi syariah dan keuangan publik.

Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang diperoleh dari: Buku dan literatur ilmiah tentang akuntansi syariah dan keuangan publik Islam. Artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan. Standar akuntansi syariah yang diterbitkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dokumen kebijakan dan laporan keuangan lembaga publik Islam (seperti lembaga zakat dan wakaf). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu menelusuri dan mengkaji literatur dari database akademik, perpustakaan digital, serta sumber resmi yang kredibel.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menganalisis dokumen dan literatur yang telah dikumpulkan. Menurut Krippendorff (2018), analisis isi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk membuat inferensi yang valid dan sistematis dari teks atau dokumen tertulis.

Tahapan analisis dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data yaitu memilih literatur yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Klasifikasi Data yaitu mengelompokkan konsep berdasarkan tema seperti prinsip akuntansi syariah, efisiensi, efektivitas, dan tata kelola publik.
3. Analisis Interpretatif yaitu mengkaji hubungan antara penerapan akuntansi syariah dan peningkatan efisiensi serta efektivitas keuangan publik Islam.

4. Penarikan Kesimpulan yaitu menyusun sintesis hasil analisis untuk menjawab tujuan penelitian.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi ilmiah dan dokumen resmi guna memastikan konsistensi dan validitas informasi. Selain itu, peneliti memprioritaskan sumber yang telah melalui proses *peer-review* untuk meningkatkan kredibilitas penelitian (Creswell, 2014).

DISCUSSION

Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Keuangan Publik Islam

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa akuntansi syariah memiliki karakteristik normatif yang membedakannya dari akuntansi konvensional, terutama dalam aspek nilai dan tujuan. Akuntansi syariah menekankan prinsip keadilan ('adl), amanah, transparansi, serta tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan publik Islam agar dana yang bersumber dari masyarakat, seperti zakat, wakaf, dan pajak syariah, dikelola secara profesional dan sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid al-shariah*).

Menurut Muhammad Umer Chapra (2000), sistem ekonomi Islam harus berorientasi pada kesejahteraan kolektif dan distribusi yang adil. Dalam konteks keuangan publik, penerapan akuntansi syariah memastikan bahwa anggaran negara atau lembaga publik Islam tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga adil secara sosial. Dengan demikian, akuntansi syariah berfungsi sebagai instrumen kontrol sekaligus pedoman moral dalam pengelolaan dana publik.

Peran Akuntansi Syariah dalam Meningkatkan Efisiensi Keuangan Publik

Efisiensi dalam keuangan publik berkaitan dengan kemampuan lembaga dalam mengelola sumber daya secara optimal untuk meminimalkan pemborosan anggaran. Berdasarkan analisis literatur, penerapan akuntansi syariah meningkatkan efisiensi melalui beberapa mekanisme:

1. Sistem Pengendalian Internal yang Ketat: Standar akuntansi syariah yang dikembangkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) menekankan pentingnya pengawasan dan audit berbasis kepatuhan syariah. Hal ini mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan disiplin anggaran.

2. **Transparansi Pelaporan Keuangan:** Penyajian laporan keuangan yang jelas dan terstandar membantu manajemen publik dalam mengevaluasi realisasi anggaran serta melakukan perbaikan kebijakan secara cepat dan tepat.
3. **Pencegahan Praktik Riba dan Pemborosan:** Larangan riba dan spekulasi dalam Islam mendorong pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati dan produktif, sehingga sumber daya publik digunakan secara efisien.
4. Sejalan dengan konsep value for money dalam akuntansi sektor publik (Mardiasmo, 2018), akuntansi syariah mendukung prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas secara simultan dengan tambahan dimensi etis dan spiritual.

Peran Akuntansi Syariah dalam Meningkatkan Efektivitas Keuangan Publik

Efektivitas mengacu pada sejauh mana tujuan program atau kebijakan publik dapat tercapai. Dalam perspektif Islam, efektivitas tidak hanya diukur dari pencapaian target anggaran, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Akuntansi syariah meningkatkan efektivitas melalui:

1. **Pelaporan Berbasis Akuntabilitas:** Pengungkapan informasi yang lengkap dan jujur meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik Islam. Penelitian Farook, Kabir Hassan, dan Lanis (2011) menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi berpengaruh terhadap legitimasi dan persepsi akuntabilitas lembaga Islam.
2. **Evaluasi Kinerja Berbasis Tujuan Syariah:** Laporan keuangan tidak hanya menjadi alat kontrol administratif, tetapi juga instrumen evaluasi pencapaian tujuan sosial dan distribusi kesejahteraan.
3. **Penguatan Good Governance:** Integrasi prinsip transparansi dan tanggung jawab sosial memperkuat tata kelola publik yang profesional dan bebas dari praktik korupsi.

Dengan demikian, akuntansi syariah berkontribusi pada efektivitas keuangan publik melalui peningkatan kualitas informasi keuangan dan penguatan sistem pertanggungjawaban publik.

Integrasi Akuntansi Syariah dan *Maqashid al-Shariah*

Dalam konteks keuangan publik Islam, penerapan akuntansi syariah harus selaras dengan tujuan utama syariah (*maqashid al-shariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Laporan keuangan publik yang transparan dan akuntabel mendukung perlindungan harta (*hifz al-mal*) serta distribusi yang adil kepada

masyarakat yang membutuhkan. Dengan pengelolaan dana zakat dan wakaf yang efektif, institusi publik Islam dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi syariah memiliki dampak strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Meskipun memiliki potensi besar, penerapan akuntansi syariah dalam keuangan publik menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami standar akuntansi syariah.
2. Kurangnya harmonisasi antara standar internasional dan regulasi nasional.
3. Rendahnya literasi akuntabilitas publik di beberapa lembaga keuangan Islam.
4. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, penguatan regulasi, serta pengawasan yang berkelanjutan untuk memastikan penerapan akuntansi syariah berjalan secara optimal.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa akuntansi syariah berperan signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas keuangan publik Islam. Melalui sistem pelaporan yang transparan, pengendalian internal yang kuat, serta orientasi pada nilai keadilan dan kemaslahatan, akuntansi syariah mampu memperkuat tata kelola publik yang profesional dan berintegritas.

Dengan demikian, penerapan akuntansi syariah tidak hanya meningkatkan kinerja administratif, tetapi juga memperkuat dimensi moral dan sosial dalam pengelolaan keuangan publik Islam.

Tabel 1. Persamaan & Perbedaan Keuangan Publik Konvensional & Keuangan Publik Islam

No	Aspek	Keuangan Publik Konvensional	Keuangan Publik Islam	Persamaan
1	Landasan Filosofis	Berbasis teori ekonomi klasik, Keynesian, dan welfare state	Berbasis Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, dan maqashid syariah	Sama-sama bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2	Tujuan Pengelolaan	Stabilitas ekonomi, pertumbuhan, distribusi pendapatan	Kesejahteraan dunia-akhirat (falah), keadilan ('adl), kemaslahatan	Sama-sama mengupayakan kesejahteraan dan pemerataan
3	Sumber Penerimaan	Pajak, retribusi, utang, hibah	Zakat, infak, sedekah, wakaf, kharaj, jizyah, pajak (dharibah), hasil BUMN syariah	Sama-sama memiliki mekanisme pungutan dari masyarakat
4	Sistem Anggaran	APBN/APBD berbasis sistem akrual atau kas	Baitul Mal atau lembaga pengelola dana publik berbasis syariah	Sama-sama menggunakan sistem perencanaan dan pengawasan anggaran
5	Instrumen Pembiayaan	Obligasi, surat utang negara berbunga	Sukuk (tanpa riba), pembiayaan berbasis akad syariah	Sama-sama menggunakan instrumen pasar untuk pembiayaan negara
6	Prinsip	Efisiensi, efektivitas,	Amanah, keadilan,	Sama-sama menekankan

No	Aspek	Keuangan Publik Konvensional	Keuangan Publik Islam	Persamaan
	Pengelolaan	transparansi	transparansi, akuntabilitas, larangan riba	transparansi dan akuntabilitas
7	Distribusi Kekayaan	Melalui subsidi, bantuan sosial, pajak progresif	Melalui zakat, distribusi harta, larangan penimbunan (ihtikar)	Sama-sama bertujuan mengurangi kesenjangan sosial
8	Pengelolaan Utang	Boleh berbasis bunga	Tidak diperbolehkan berbasis riba	Sama-sama dapat menggunakan utang sebagai instrumen fiskal
9	Akuntabilitas	Bertanggung jawab kepada parlemen dan publik	Bertanggung jawab kepada publik dan Allah SWT (dimensi spiritual)	Sama-sama mengutamakan pertanggungjawaban publik
10	Dimensi Spiritual	Bersifat sekuler (tidak berbasis agama tertentu)	Terintegrasi dengan nilai spiritual dan etika Islam	Sama-sama mengatur kepentingan publik, tetapi berbeda pada dasar nilai

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa keuangan publik konvensional dan keuangan publik Islam memiliki persamaan fundamental dalam fungsi dan tujuan makro, yaitu menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keduanya juga menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Dalam praktik modern, kedua sistem sama-sama menggunakan instrumen fiskal seperti pajak dan pengelolaan utang untuk mendukung pembangunan nasional.

Namun, terdapat perbedaan mendasar pada landasan filosofis, sumber hukum, serta orientasi nilai yang melandasi sistem tersebut. Keuangan publik konvensional berakar pada teori ekonomi modern yang bersifat sekuler dan berorientasi pada kesejahteraan material serta pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, keuangan publik Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis dengan pendekatan maqashid syariah, sehingga tidak hanya menekankan kesejahteraan duniawi, tetapi juga falah (kesejahteraan dunia dan akhirat). Sistem Islam mengintegrasikan dimensi moral dan spiritual, seperti prinsip keadilan ('adl), amanah, larangan riba, serta distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan wakaf

Tabel 2. Perbedaan Efektivitas & Efisiensi Keuangan Publik Konvensional & Publik Islam

No	Aspek	Keuangan Publik Konvensional	Keuangan Publik Islam
1	Definisi Efisiensi	Penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai output maksimal (value for money).	Penggunaan sumber daya secara optimal sesuai prinsip amanah dan tanpa pemborosan (israf).
2	Definisi Efektivitas	Tingkat pencapaian target program sesuai indikator kinerja yang	Tingkat pencapaian tujuan program yang tidak hanya memenuhi target duniawi,

No	Aspek	Keuangan Publik Konvensional	Keuangan Publik Islam
		ditetapkan pemerintah.	tetapi juga selaras dengan maqashid syariah.
3	Ukuran Efisiensi	Rasio biaya terhadap output, penghematan anggaran, efisiensi teknis dan alokatif.	Rasio biaya terhadap manfaat sosial serta kepatuhan terhadap prinsip halal dan bebas riba.
4	Ukuran Efektivitas	Capaian program pembangunan, pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan.	Capaian kesejahteraan (falah), pemerataan distribusi, keadilan sosial, dan keberkahan.
5	Orientasi Nilai	Rasionalitas ekonomi dan maksimalisasi utilitas.	Keadilan ('adl), kemaslahatan (masalah), dan tanggung jawab spiritual (amanah).
6	Pengendalian Pemborosan	Melalui audit, sistem pengawasan internal, dan regulasi fiskal.	Melalui audit, pengawasan syariah (DPS), serta larangan israf dan gharar.
7	Sumber Pembiayaan Efisien	Pajak, obligasi berbunga, pinjaman luar negeri.	Zakat, wakaf, sukuk, pajak (dharibah) tanpa riba.
8	Dimensi Akuntabilitas	Bertanggung jawab kepada parlemen dan masyarakat.	Bertanggung jawab kepada masyarakat dan kepada Allah SWT (dimensi ukhrawi).
9	Indikator Keberhasilan	Stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi makro.	Keseimbangan ekonomi, distribusi adil, dan tercapainya maqashid syariah.
10	Tujuan Akhir	Kesejahteraan material masyarakat.	Kesejahteraan dunia dan akhirat (falah).

Berdasarkan pembahasan mengenai efektivitas dan efisiensi dalam keuangan publik konvensional dan keuangan publik Islam, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya publik guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun, perbedaan utama terletak pada orientasi nilai, indikator keberhasilan, serta dimensi pertanggungjawaban yang melandasinya.

Dalam sistem konvensional, efisiensi diartikan sebagai kemampuan meminimalkan biaya untuk menghasilkan output maksimal (value for money), sedangkan efektivitas diukur dari tingkat pencapaian target program pembangunan berdasarkan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif dan makroekonomi. Fokusnya lebih pada stabilitas fiskal, pertumbuhan ekonomi, serta keberhasilan pencapaian program pemerintah.

Sebaliknya, dalam keuangan publik Islam, efisiensi tidak hanya menekankan optimalisasi sumber daya, tetapi juga menghindari pemborosan (israf) dan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba dan gharar. Sementara itu, efektivitas tidak semata-mata diukur dari capaian ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan publik mampu mewujudkan keadilan ('adl), pemerataan distribusi, serta kemaslahatan

yang sesuai dengan maqashid syariah. Dengan demikian, efektivitas dalam sistem Islam memiliki dimensi yang lebih luas karena mencakup aspek sosial dan spiritual.

Secara keseluruhan, perbedaan antara kedua sistem tersebut menunjukkan bahwa keuangan publik Islam menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan integrasi nilai moral dan tanggung jawab ukhrawi, sedangkan sistem konvensional lebih menekankan rasionalitas ekonomi dan pengukuran kinerja berbasis indikator teknokratis. Integrasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan publik modern berpotensi memperkuat kualitas tata kelola yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan yang berkelanjutan.

CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan mengenai perbandingan keuangan publik konvensional dan keuangan publik Islam, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. Keduanya juga menekankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada landasan filosofis dan normatifnya. Keuangan publik konvensional berakar pada teori ekonomi modern yang bersifat sekuler dan berorientasi pada kesejahteraan material. Sementara itu, keuangan publik Islam berlandaskan nilai-nilai syariah yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis serta berorientasi pada tercapainya falah (kesejahteraan dunia dan akhirat) dan kemaslahatan umat. Sistem keuangan publik Islam juga mengintegrasikan dimensi spiritual dan etika, seperti prinsip amanah, keadilan ('adl), larangan riba, serta distribusi kekayaan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Dengan demikian, keuangan publik Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi berbasis nilai moral dan spiritual. Dalam konteks modern, integrasi antara sistem konvensional dan prinsip-prinsip syariah berpotensi memperkuat tata kelola keuangan publik yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif.

REFERENCES

Abdul-Rahman, A. R. (2010). *AN INTRODUCTION TO ISLAMIC ACCOUNTING: THEORY AND PRACTICE*. CERT Publications.

- Ahmed, H. (2004). *ROLE OF ZAKAH AND AWQAF IN POVERTY ALLEVIATION*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Chapra, M. U. (2000). *THE FUTURE OF ECONOMICS: AN ISLAMIC PERSPECTIVE*. Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *THE ISLAMIC VISION OF DEVELOPMENT IN THE LIGHT OF MAQASID AL-SHARIAH*. Islamic Research and Training Institute.
- Hameed, S. (2001). ISLAMIC ACCOUNTING—ACCOUNTING FOR THE NEW MILLENNIUM? *ACCOUNTING, COMMERCE & FINANCE: THE ISLAMIC PERSPECTIVE JOURNAL*, 5(1–2), 1–25.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *HANDBOOK OF ISLAMIC BANKING*. Edward Elgar Publishing.
- Kamla, R., Gallhofer, S., & Haslam, J. (2006). ISLAM, NATURE AND ACCOUNTING: ISLAMIC PRINCIPLES AND THE NOTION OF ACCOUNTING FOR THE ENVIRONMENT. *Accounting Forum*, 30(3), 245–265. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2006.05.003>
- Mannan, M. A. (1997). *ISLAMIC ECONOMICS: THEORY AND PRACTICE*. Sh. Muhammad Ashraf Publishers.
- Rahman, A. (1999). *ECONOMIC DOCTRINES OF ISLAM* (Vol. 1). Islamic Publications.
- Triyuwono, I. (2012). *AKUNTANSI SYARIAH: PERSPEKTIF, METODOLOGI, DAN TEORI*. Rajawali Pers.
- Widodo, H. (2011). *KEUANGAN PUBLIK ISLAM: PENDEKATAN TEORETIS DAN PRAKTIS*. Pustaka Pelajar.
- Yusuf, A. A. (2014). PUBLIC FINANCE IN ISLAM: CONCEPT AND PRACTICE. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC AND MIDDLE EASTERN FINANCE AND MANAGEMENT*, 7(3), 361–375. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2013-0025>